

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN SERTA
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan, Penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan menjadi kewenangan Daerah;
- b. bahwa untuk pengaturan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kelurahan dimaksud huruf a di atas perlu diatur dalam Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara tahun 1964 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 02 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 03 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN SERTA STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah ;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Barat;
- e. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Lampung Barat;
- f. Pemerintah Pekon adalah Peratin dan perangkat Pekon;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- h. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- i. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar atau di dalam wilayah kelurahan yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan dan atau penataan Kelurahan;
- j. Penggabungan kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru;
- k. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada;
- l. Penataan kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di luar wilayah kelurahan yang sudah ada, melalui perubahan status pekon menjadi kelurahan;
- m. Lembaga Himpun Pemekonan selanjutnya disebut LHP adalah Lembaga Himpun yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk di Ibukota Kabupaten dan Kawasan perkotaan;
- (3) Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor penduduk minimal 3000 jiwa atau 600 KK.
 - b. Faktor luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara berdayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - c. Faktor letak, yaitu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintah dan pusat-pusat pembangunan.
 - d. Faktor prasarana yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan.
 - e. Faktor kehidupan masyarakat yaitu mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
 - f. Faktor-faktor budaya yaitu agama dan adat-istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain :
 - a. Majemuk;
 - b. Lebih dinamis;
 - c. Sensitif dan kritis;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas telah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Bagian Ketiga

Nama, Penduduk, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

- (1) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini harus menyebutkan nama, jumlah penduduk, luas wilayah dan batas-batas wilayah kelurahan yang dibentuk;
- (2) Hasil pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diusulkan oleh peratin melalui Camat kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintah Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan;
- (2) Jumlah lingkungan dalam suatu kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) dapat dihapuskan atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat;
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati;
- (3) Penghapusan dan penggabungan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Perubahan Pekon Menjadi Kelurahan

Pasal 7

- (1) Pekon-pekon di wilayah Kabupaten yang berada di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya atas prakarsa masyarakat dapat dibentuk menjadi kelurahan;

- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan Pemerintah Pekon atas persetujuan Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Perubahan status pekon menjadi kelurahan ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung barat.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya status pekon menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 7, kewenangan Pekon berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Organisasi pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pelayanan Umum;
 - e. Seksi Pembangunan.
- (2) Bagan struktur organisasi pemerintah kelurahan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

PERSONIL

Pasal 10

Lurah dan perangkatnya merupakan pejabat struktural yang diangkat oleh Bupati Lampung Barat melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Lampung Barat.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari camat;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.

BAB VII

SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Di dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu oleh sekretariat;
- (2) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Pelayanan Umum
 - d. Seksi Pembangunan

Pasal 13

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 1,2 dan 3 di atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Lurah dalam satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat)

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Terhadap Kelurahan yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan daerah ini dianggap telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang untuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Barat.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 30 juni 2004

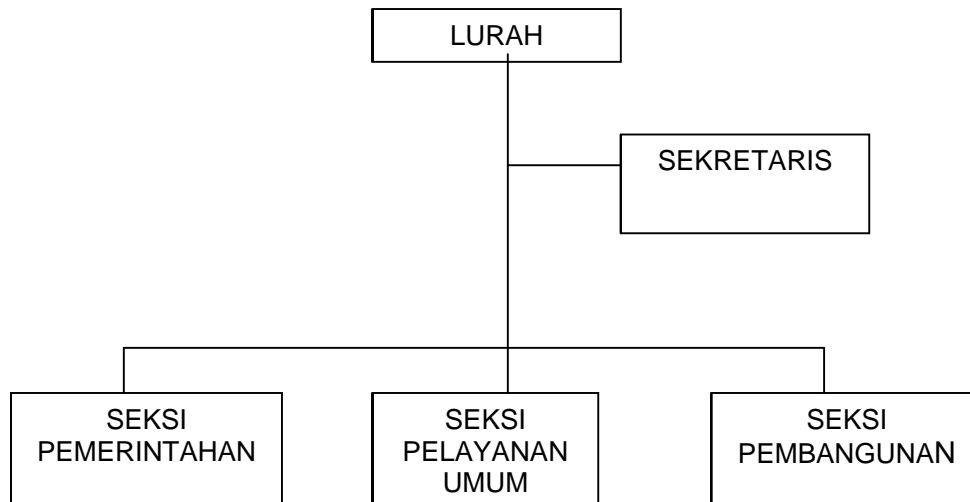
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

ERWIN NIZAR T

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KELURAHAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
N O M O R : 17 Tahun
2004
TANGGAL : 30 Juni 2004



BUPATI LAMPUNG BARAT,

ERWIN NIZAR T